

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghoffar, *Perbandingan kekuasaan Presiden Indonesia setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan negara maju*, Jakarta: Kencana, 2009.
- H.A.K. Pringgodigdo, 1981, *Tiga Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Pembangunan, 1981.
- H.Marshaal, *Amandemen UUD 1945 Dalam Sorotan*, Palembang: UMP, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Jakarta : UII Press, 2005.
- J.C.T. Simamongkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1983.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, 1988.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lubis, Solly, *Ketatanegaraan RI*, Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1984.
- Suharial dan Firdaus Arifin, *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002, Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- SF Marbun, dkk., *Dimensi-Dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, Makalah, “*Kepolisian Dalam Tata Pemerintahan*”.

JURNAL

- Ni'matuI Huda, 2001, *Kontroversi Dasar Hukum Sidang Istimewa MPR dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001 (Tinjauan Yuridis Ketatanegaraan)*, *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 16.
- Kusuma, R. M. A. B, 2005, *Profil Founding Fathers dan kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 2, Nomor 1.

Indrayana, Deny, 2007, *Mendesain presidensial yang efektif, bukan 'Presiden sial' atau Presiden sialan*, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Volume 7, Nomor 1.

Mei Susanto, 2016, *Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden*, *Jurnal Yudisial*, Volume 9, Nomor 3.

Bachtiar batial, 2014, *Pertanggungjawaban penggunaan Hak Prerogatif Presiden di bidang Yudikatif dalam menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 No. 1.

Naswar, 2004, *Hubungan Kekuasaan Presiden Dengan DPR Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, *Jurnal Mahkamah, UIR Press, Pekanbaru*, Volume 15, Nomor 5.

Oksep Adhayanto, 2011, *Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, *Jurnal Fisip Umrah*, Volume 2, Nomor 2.

Kaharudin, 2016, *Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, *Jurnal UMY*, Volume 23 Nomor 2.

Riri Nazriyah, 2010, *Pemberhentian Jaksa Agung Dan Hak Prerogatif Presiden*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 12.

Kusuma, R.M.A.B, 2010, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, *Jurnal Konstitusi Universitas Indonesia*, Volume 1, Nomor 4.

Rizky Putra, 2015, *Pengangkatan dan Pemberhentian KAPOLRI Oleh Presiden*, *Jurnal Yuridika*, Volume 30 No 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SURAT KABAR DAN WEB

<file:///F:/umum/HakPrerogatifPresidenTerkaitPengangkatandanPemberhentianKapolriTanggapannyaUntukProfDennyIndrayana,dkk.htm> di unduh tgl 2 juni 2016 jam 21.47 wib;

<http://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif> dilihat pada 02 juni 2016 , pkl. 15.30 WIB;

<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/> di unduh 03 juni 2016 jam 23.30 wib;

Indrayana,Deny, dkk., Detik.com,Kamis 22 Januari 2015;

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b5b42e6debe/ini-kronologi-penetapan-budi-gunawan-sebagai-tersangka> di unduh Rabu, 14 Januari 2015;

Bagir Manan, *Kekuasaan Prerogatif*, Makalah yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998.